BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan mengenai keberadaan bukti elektronik belum diatur dalam KUHAP. Namun kekuatan pembuktian bukti elektronik sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana bukti elektronik dapat dipergunakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau alat bukti petunjuk. Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVI/2016 adalah bahwa alat bukti elektronik masih bisa digunakan dalam peradilan pidana hanya saja ada pembatasan mengenai cara perolehan dan pengajuannya sebagai alat bukti elektronik pada proses persidangan maka hakim harus didorong agar berani mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).
2. Bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, namun belum ada pengaturan sendiri di dalam KUHAP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Beda halnya dengan di Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Prancis dan Belanda yang sudah mengatur tentang bukti elektronik dan bagaimana cara perolehan dan implikasi hukum dari cara perolehan tersebut. Untuk kebijakan kedepan di dalam RUU KUHAP sudah diatur mengenai alat bukti elektronik yang membuat kepastian hukum itu terjadi. Namun dikarenakan RKUHAP yang sampai sekarang tidak kunjung

disahkan, perlunya alternatif lain agar alat bukti elektronik dapat berfungsi tanpa hambatan, salah satunya adalah dengan membuat UU Penyadapan agar alat bukti elektronik ini dapat berfungsi pasca tanpa adanya hambatan pasca Putusan MK No 20/PUU-XIV/2016.

B. Saran

1. Hakim dan para penegak hukum lainnya diharapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara hendaknya dapat lebih cermat dan efektif dalam menilai suatu alat bukti elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengingat bukti elektronik ini tidak terdapat dalam KUHAP dan hanya sebagai perluasan alat bukti petunjuk, dan bukti elektronik ini dapat dengan mudah dimanipulasi atau diubah atau diedit sehingga sulit untuk menilai keasliannya.
2. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, Pemerintah diharapkan untuk segera menambah bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah demi menjamin kepastian hukum. Alat bukti elektronik (Informasi elektronik; dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya) segera dimasukkan sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui RUU KUHP yang baru. Pemerintah juga bisa memperbarui aturan mengenai Penyadapan jika memperbarui KUHAP dirasa memiliki banyak hambatan. Karena di Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis dan Belanda sudah memiliki aturan mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini diharapkan agar alat bukti elektronik memiliki kekuatan dan kepastian hukum.